

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berusaha untuk mengungkap kebangkitan kembali rezim Taliban yang menciptakan paradoks, terutama dalam konteks kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh kepergian Amerika Serikat (AS). Isu ini menjadi sorotan penting dalam studi Hubungan Internasional karena mencerminkan kompleksitas dan dinamika global kontemporer saat penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan pada Agustus 2021 menandai perubahan dinamika politik, ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut. Selain itu, isu ini penting karena menawarkan wawasan berharga tentang batasan kekuatan militer dalam membentuk hasil politik jangka panjang. Studi ini akan berfokus pada kebangkitan rezim Taliban di Afghanistan melalui negara ekstra kawasan yang ditelusuri dengan menggunakan teori sistem intrusif oleh Louis J. Cantori dan konsep kekosongan kekuasaan (*Power Vacuum*) oleh Kenneth Waltz.

Dalam perspektif historis, Afghanistan telah lama menjadi arena persaingan pengaruh antara berbagai kekuatan regional dan global. Sejak invasi Soviet pada 1979 hingga intervensi AS pasca serangan 11 September 2001, negara ini telah menjadi titik fokus dari berbagai upaya penetrasi eksternal. Namun, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana penarikan pasukan AS pada 2021 tidak hanya menciptakan kekosongan kekuasaan, tetapi juga mengintensifkan dinamika sistem intrusif di kawasan, terutama melalui persaingan pengaruh kekuatan besar lainnya

yaitu Rusia dan Cina. Sebagaimana sistem anarki, persepsi tentang kelemahan atau ketidakstabilan suatu negara atau wilayah bisa sama pentingnya dengan realitas di lapangan. Negara-negara mungkin bertindak berdasarkan persepsi mereka tentang adanya kekosongan kekuasaan, bahkan ketika situasi aktualnya lebih kompleks. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan menciptakan momen di mana persepsi menjadi senjata (M. Ali 2020).

Ketika keputusan Amerika untuk menarik diri telah bulat, kondisi Afghanistan sontak menjadi kacau secara drastis sehingga masyarakat internasional menilai ini sebagai tanda ketidakmampuan pemerintah Afghanistan untuk bertahan, memperkuat narasi bahwa Taliban adalah kekuatan yang akan dan mampu untuk bangkit kembali (Albrecht, Rude and Stitteneder 2021). Dalam kekosongan tersebut, kekhawatiran tentang kekacauan dan ketidakpastian justru memicu reaksi berantai melalui kelompok bersenjata lain yang melihat peluang untuk memperluas pengaruh, sementara rakyat biasa mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang dianggap lemah. Dengan kondisi ini, Taliban berhasil memanfaatkan situasi untuk menunjukkan diri sebagai alternatif yang mampu memberikan stabilitas melalui kekuatan dan ideologi mereka (Azizi 2019).

Dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Selatan memasuki fase baru yang signifikan dengan kebangkitan kembali rezim Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021. Peristiwa ini menandai titik balik lanskap geopolitik regional, terutama setelah dua dekade kehadiran militer Amerika Serikat dan upaya pembangunan sistem demokratis yang didukung komunitas internasional.

Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan telah menciptakan kekosongan kekuasaan, membuka ruang bagi dinamika baru dalam sistem intrusif di kawasan Asia Selatan (Danish 2016).

Per tahun 2019, administrasi Trump mengintensifkan upaya untuk mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan yang telah berlangsung selama hampir dua dekade sejak invasi 2001, melalui kebijakan *America First*. Motivasi utama di balik kebijakan ini adalah kelelahan perang yang dirasakan publik Amerika, biaya finansial yang besar, dan persepsi bahwa tujuan awal intervensi telah bergeser dari melawan terorisme menjadi *nation-building* yang tidak berkelanjutan. Tercatat dari dimulainya invasi 2001 hingga per tahun 2019, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat telah mengalokasikan antara \$934 miliar hingga \$978 miliar, menurut perkiraan yang disesuaikan dengan inflasi yang dihitung oleh Neta Crawford, seorang profesor ilmu politik dan co-direktur Proyek Biaya Perang di Universitas Brown (Whitlock 2019).

Oleh karena itu, AS merubah pendekatan kepada Taliban melalui negosiasi yang dimulai secara serius di Doha, Qatar, pada tahun 2020. Proses ini kontroversial karena mengesampingkan andil pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika, menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi dan daya tahan setiap kesepakatan yang dicapai. Pada Februari 2020, Amerika dan Taliban menandatangani perjanjian yang menetapkan jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat, dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban, termasuk komitmen

untuk tidak mengizinkan Al-Qaeda atau kelompok teroris lainnya beroperasi di wilayah yang mereka kendalikan (U.S Department of State 2020).

Perjanjian Doha ini, meskipun dianggap sebagai langkah diplomatis penting, namun memiliki kelemahan mendasar. Tidak adanya gencatan senjata komprehensif atau mekanisme verifikasi yang kuat untuk komitmen Taliban meninggalkan celah (pelanggaran perjanjian) yang terlihat signifikan. Pengecualian pemerintahan Afghanistan dari negosiasi utama juga melemahkan posisi Amerika dan memberikan legitimasi politik kepada Taliban (Talmullah, et al. 2022). Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Taliban menafsirkan perjanjian tersebut sebagai rencana kemenangan. Mereka meningkatkan operasi militer terhadap pasukan keamanan Afghanistan, seraya berhati-hati menghindari serangan langsung terhadap pasukan Amerika untuk mencegah pelanggaran perjanjian (Cordesman 2022).

Strategi ini memungkinkan Taliban untuk memperluas kontrol teritorial mereka tanpa memicu respon militer Amerika yang signifikan (SIGAR 2021). Transisi ke administrasi Biden pada Januari 2021, awalnya menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan perubahan kebijakan. Namun, pada April 2021, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika akan menyelesaikan penarikan pasukan pada 31 Agustus 2021, menegaskan kembali komitmen untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai “perang abadi.” Keputusan ini menjadi populer di kalangan publik Amerika dan menghadapi banyak kritik dari analis keamanan yang memperingatkan tentang konsekuensi potensial penarikan pasukan yang terburu-buru (Cordesman 2022).

Gambar 1.1 Peta Militer Rezim Taliban di Afghanistan Tahun 2021



Sumber: (Deutsche Welle 2021)

Peta di atas menggambarkan situasi kontrol wilayah Afghanistan pada 10 Agustus 2021, tepat sebelum Taliban merebut kekuasaan penuh di negara tersebut. Berdasarkan peta, wilayah yang dikuasai oleh Taliban ditunjukkan dengan warna merah, sedangkan wilayah yang masih berada di bawah kendali pemerintah Afghanistan berwarna abu-abu. Wilayah yang diperebutkan antara kedua kekuatan diwarnai kuning. Dari peta ini, terlihat jelas bahwa Taliban telah menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, terutama di bagian selatan dan barat negara, termasuk kota-kota penting seperti Kandahar dan Herat. Sementara itu, wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah semakin menyusut, terutama di sekitar ibu kota Kabul dan beberapa daerah di timur laut. Banyak wilayah yang masih diperebutkan (kuning) menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi pertempuran sengit antara Taliban dan Pasukan Pemerintah (Deutsche Welle 2021).

Laju kemajuan Taliban meningkat secara drastis dengan keberhasilan merebut Ibu Kota Provinsi satu demi satu yang sering kali dengan sedikit perlawanan karena adanya kombinasi negosiasi lokal, intimidasi dan demoralisasi pasukan pemerintah. Kecepatan runtuhnya pemerintah Afghanistan mengejutkan banyak pengamat dan pembuat kebijakan Amerika (Cordesman 2022). Klimaks dari proses ini terjadi pada 15 Agustus 2021, ketika Taliban memasuki Kabul tanpa pertempuran signifikan, dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan. Peristiwa ini menandai runtuhnya pemerintah yang didukung Amerika dan kembalinya Taliban ke kekuasaan, setelah hampir 20 tahun mereka digulingkan (BBC 2021).

Penelitian ini bermaksud mengaplikasikan kerangka teoritis Cantori untuk membongkar mekanisme tersembunyi dengan Rusia dan Cina terutama AS yang menjadi aktor kekuatan besar dalam skema Taliban di Afghanistan. Melalui analisis mendalam terhadap aksi AS, Rusia dan Cina serta penarikan pasukan AS, hadir perspektif baru dalam memahami transformasi kekuasaan ketika kepentingan, kekuasaan, dan perubahan sosial-politik bertemu dalam interaksi yang dinamis.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana keterlibatan negara-negara besar luar kawasan terlibat dalam percaturan politik di kawasan Asia Selatan?

2. Mengapa terjadi kebangkitan rezim Taliban di Afghanistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus yakni keterlibatan negara besar luar kawasan yang terlibat dalam percaturan politik di kawasan Asia Selatan yang selaras dengan alasan terjadinya kebangkitan rezim Taliban di Afghanistan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik secara langsung dalam penerapan praktik maupun tidak langsung melalui pengembangan pengetahuan terutama dalam memperkaya kajian akademis dengan temuan baru yang dapat diterapkan dalam praktik nyata.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan studi Hubungan Internasional dalam bidang geopolitik dan politik internasional, dengan fokus pada paradoksal sistem intrusif terhadap kebangkitan rezim Taliban di Afghanistan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini penting sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan seperti di Amerika Serikat mengenai dampak penarikan pasukan mereka yang memicu kebangkitan rezim Taliban di Afghanistan dalam konteks geopolitik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat

internasional untuk menilai kebijakan Amerika Serikat, aksi Rusia dan Cina terhadap Taliban dan implikasinya terhadap keamanan serta stabilitas regional, yang berdampak pada dinamika kekuasaan atau pola sistem intrusif, khususnya di kawasan Asia Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang dalam setiap bab terdapat beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasan penelitian. Bab I berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran hipotesis/argumen utama dan metode penelitian. Bab III berisi bagian pembahasan mengenai Sistem Subordinat kawasan Asia Selatan. Bab IV berisi tentang Sistem Intrusif Asia Selatan. Skripsi ini akan diakhiri dengan Bab V yang berisi bagian penutup yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang diinterpretasikan berdasarkan hasil akhir penelitian.